

# Efek Liberalisasi di ASEAN bagi Indonesia sebagai Negara Dunia Ketiga

Dwi Adiyanti<sup>1</sup>

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama Medan

Email: ardiyanti.1987@gmail.com

## Abstrak

Kerjasama antar Negara anggota ASEAN yang terangkum dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu praktek liberalisasi. MEA yang terangkum dalam empat pilar memiliki dampak signifikan terhadap arah kerjasama antara sepuluh Negara anggota ASEAN. Arah kerjasama dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan merupakan sebuah langkah terpadu dari masing-masing Negara anggota untuk kemajuan komunitas regional di Asia Tenggara. ASEAN sebagai sebuah komunitas regional semakin meningkatkan kiprahnya untuk ikut bersaing dan meningkatkan kerjasama di tingkat regional khususnya dan global pada umumnya. Dalam praktek kerjasama tersebut, terlihat ada usaha dari berbagai Negara untuk ikut berpartisipasi dalam persaingan ini. Tujuan besar untuk memajukan perekonomian di kawasan Asia Tenggara mendapat respon positif dari semua Negara anggota dengan membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun, dengan berbagai macam masalah perekonomian di masing-masing Negara anggota ASEAN, kerjasama dalam lingkup MEA ini membawa dampak liberalisasi yang tidak semua bisa diikuti oleh Negara anggota ASEAN yang masih tergolong dalam Negara dunia ketiga, salah satunya adalah Indonesia.

**Kata kunci:** masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), negara dunia ketiga, liberalisasi, kerjasama

## Abstract

*The cooperation conducted among ASEAN member states which is encapsulated in Asean Economic Community (AEC) is one of liberalization practices. AEC consists of four important pillars which gives significant impact on cooperation between them, especially in economic and development. The cooperation focus on increasing economic and development in each member states which also needs strong commitment as a regional community in Southeast Asia. ASEAN as a regional community keep increasing its capability to accelerate the cooperation in the regional and global level at the same time. In the end, we might see effort from each state to participate. However, each state must cope with their own domestic problems, such as politic, economic, and development. This research will prove that cooperation AEC creates wave of liberalization among ASEAN member states which is not easy to cope with, for example Indonesia which is still included in the third world countries list.*

**Keywords:** ASEAN Economic Community (AEC), third world country, liberalization, and cooperation

---

<sup>1</sup> Staff pengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Potensi Utama Medan

## 1. Konsep Kerjasama Liberalisasi antar Negara Anggota ASEAN

Kerjasama antar negara anggota ASEAN merupakan sebuah kemajuan besar dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. ASEAN yang merupakan sebuah komunitas regional sekarang semakin berkembang dengan peningkatan kerjasama ekonomi antar Negara anggota ASEAN. Tak jarang, sebagai sebuah komunitas regional, ASEAN harus menghadapi berbagai konflik bersamaan dengan semakin meningkatnya permintaan akan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kajian tentang perdebatan prinsip non-intervensi dalam resolusi konflik antar negara anggota ASEAN, kini cenderung mengarah ke kajian tentang kerjasama ekonomi dan pola pertahanan antar negara anggota ASEAN. Kerjasama ekonomi antar Negara ASEAN tentu dilihat sebagai hal yang potensial akan membawa peningkatan ekonomi di wilayah Asia Tenggara, seperti tulisan Vinayak HV et al (2014), *“The ten member states of the Association of Southeast Asian Nations collectively comprise the seventh-largest economy in the world”*. Negara anggota ASEAN secara keseluruhan termasuk dalam peringkat ke tujuh di dunia. Negara anggota ASEAN seperti diketahui ada 10 negara yang terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Burma. Sebagian besar negara anggota ASEAN merupakan penyedia jasa tenaga kerja terbesar ketiga setelah China dan India, seperti yang ditulis dalam Vinayak HK et al (2014),

*“Labor-force expansion and productivity improvements drive GDP growth—and ASEAN is making impressive strides in both areas. Home to more than 600 million people, it has a larger population than the European Union or North America. ASEAN has the third-largest labor force in the world, behind China and India”*.

Indonesia yang merupakan salah satu Negara anggota ASEAN menempati urutan keempat dalam jumlah populasi terbesar di dunia. Indonesia berpotensi untuk menjadi pesaing yang tangguh dalam menghadapi MEA juga besar. Namun, permasalahan daya saing kembali menjadi masalah mendasar bagi Indonesia untuk bersaing dalam MEA. Indonesia disebutkan belum siap menghadapi tantangan MEA 2015<sup>2</sup>. Dalam Jurnal tersebut juga dimuat tulisan tentang ketidaksiapan empat negara lain (Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina). Hasil temuan tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan komitmen dari para pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dalam MEA. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, juga ditemukan adanya jarak perbedaan dalam jumlah keuntungan ekonomi antar Negara anggota ASEAN yang tergabung dalam MEA<sup>3</sup>. Berikut ini adalah

---

<sup>2</sup> International journal economic and finance. Vol.4 no 11. Asean Economic Corporation: Trade Liberalization Impacts on The National Economy.2012 pdf

<sup>3</sup> Ibid

data jumlah tenaga kerja dan pengangguran di Indonesia<sup>4</sup>:

**Tabel 1: Indikator Pasar Buruh Utama**

**(2013-2015)**

Indikator Utama	Februari 2013	Agustus 2013	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
Populasi total (juta jiwa)	247.7	249.4	251.0	252.7	254.4	256.0
Populasi usia $\geq 15$ tahun (juta jiwa)	178.1	180.0	181.2	183.0	184.6	186.1
Populasi aktif secara ekonomi (juta jiwa)	123.2	120.2	125.3	121.9	128.3	122.4
Bekerja (juta jiwa)	115.9	112.8	118.2	114.6	120.8	144.8
Tidak bekerja (juta jiwa)	7.2	7.4	7.2	7.2	7.5	7.6
Tidak aktif secara ekonomi	56.0	59.8	55.9	61.1	56.3	63.7

<sup>4</sup> Indonesia investment.com <http://www.indonesia-investments.com/finance/macroeconomic-indicators/unemployment/item255> diakses 23 Agustus 2016

Catatan: Data tersebut termasuk dalam usaha pertambangan, pabrik, perlengkapan, dan pembangunan (konstruksi)

**Tabel 2: Data Jumlah Tenaga Kerja Indonesia**

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah tenaga kerja	116.5	119.4	120.3	120.2	121.9	122.4	127.8
Bekerja	108.2	111.3	113.0	112.8	114.6	114.8	120.8
Tidak Bekerja	8.3	8.1	7.3	7.4	7.2	7.6	7.0

Kedua data tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan akan bidang industri masih besar untuk menyerap tenaga kerja sebesar 127.8 juta jiwa, menandakan bahwa Indonesia masih tergantung pada adanya modal/investasi asing. Penekanan angka pengangguran di Indonesia merupakan sebuah upaya keras dari pemerintah Indonesia, yaitu mengadakan berbagai kerjasama dengan Negara industri dan memaksimalkan penguatan perekonomian dalam negeri melalui program kewirausahaan<sup>5</sup> yang didukung oleh koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

## **2. Posisi Indonesia dan Dampak Kerjasama Antar Anggota ASEAN**

Dalam kondisi seperti ini, sebagian besar negara anggota ASEAN memiliki masalah demografi yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, negara

dengan sumber daya manusia yang tinggi membutuhkan kerja sama dengan negara industri untuk menyerap tenaga kerja tersebut hingga mampu meningkatkan perekonomian di negara tersebut. Salah satunya adalah Indonesia, yang masih memiliki sebutan negara dunia ketiga (Mochtar Masoed, 2003). Indonesia yang tergolong dalam negara dunia ketiga dianggap masih belum siap untuk menghadapi tantangan menjadi bagian dari MEA. Sampai sekarang, Indonesia masih bergantung pada hutang luar negeri<sup>6</sup>. Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi masalah wabah penyakit seperti demam berdarah dan ledakan populasi<sup>7</sup>. Dengan keadaan masih terbebani hutang, Indonesia masih terus melakukan pembangunan jangka panjang. Setelah memasuki era MEA 2015, Indonesia masih terus menjadi sebuah negara yang berkewajiban memajukan perekonomian di

<sup>5</sup><http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Drs.%20Sukidjo,%20M.Pd./PERAN%20KEWIRAU SAHAAN%20DALAM%20MENGATASI%20PENGGANGGURAN%20DI%20INDONESIA.pdf> diakses 24 Agustus 2016

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan Dirjen Anggaran dan Manajemen Resiko 2015. [http://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/5Statistik/BSPUN%20%28Govt%20Debt%20Profile%29%20edisi%20Maret%202015\\_eng%281%29.pdf](http://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/5Statistik/BSPUN%20%28Govt%20Debt%20Profile%29%20edisi%20Maret%202015_eng%281%29.pdf) diakses 7 September 2016

<sup>7</sup> Indonesia termasuk sebagai Negara keempat dengan populasi terbanyak di dunia.

tingkat regional yaitu wilayah Asia Tenggara, dengan melakukan kerjasama dengan sesama negara anggota ASEAN. Namun, di saat yang sama, Indonesia juga meghadapi masalah lonjakan populasi dan peningkatan beban anggaran yang digunakan untuk tunjangan maupun pembangunan.

Indonesia yang memiliki posisi penting di kalangan anggota ASEAN merupakan pemasok sumber tenaga kerja dan juga pasar dari posisi strategis. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga merupakan konsumen produk, dengan perilaku konsumtif yang dimiliki dan juga pasar bebas seperti diterapkan sekarang ini. Sehingga, Indonesia merupakan sebuah pasar dan konsumen potensial menguntungkan di saat yang bersamaan. Seperti yang disebutkan dalam penelitian McKinsey & Company “*Indonesia’s population is young, growing and rapidly urbanizing, making it one of the fastest-growing consumer markets in the world*”.

Penelitian tersebut juga menjelaskan bagaimana perilaku penduduk di Indonesia yang semakin konsumtif didukung dengan perkembangan media sosial<sup>8</sup>. Dengan perilaku konsumtif yang didukung oleh perkembangan pemasaran melalui dunia sosial, semakin membuka pintu kerjasama. Ditambah lagi, perdagangan bebas yang membuat masyarakat Indonesia hampir tidak menemui kendala yang berarti untuk mendapatkan barang dari luar negeri. Kemudahan akses dan akses

---

<sup>8</sup><http://www.omron.id/img/pdf/id/Indonesia%20Consumer%20Report%202014.pdf> diakses 24 Agustus 2016

perdagangan yang tidak lagi mampu dibendung dari dunia sosial membuat Indonesia semakin harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan dalam dan luar negeri.<sup>9</sup>

Diantara Negara anggota ASEAN, Indonesia adalah salah satu negara penyumbang GDP sebesar 33%<sup>10</sup>. Tentu posisi ini bukan sebuah hal yang mudah bagi negara berkembang yang juga masih bergantung atas investasi negara maju, atau negara dunia ketiga. Atas dukungan investasi asing, peningkatan pembangunan dan kemudahan akses untuk melakukan perdagangan di dalam dan ke luar negeri, merupakan langkah Indoensia menuju tahapan liberalisasi. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, mengingat adanya ASEAN+ 3 dengan adanya posisi Korea, China dan Jepang.

Perpindahan buruh antar negara anggota ASEAN dalam MEA merupakan salah satu praktek liberalisasi. Masing-masing negara yang terdaftar dalam MEA melakukan konsep “*freedom of movement*”. Hampir serupa dengan Uni Eropa (UE), MEA mengijinkan adanya kebebasan akses buruh untuk bekerja ke Negara anggota dalam konteks “*skilled labor*”<sup>11</sup>. Mereka yang berprofesi menjadi buruh ahli dan berketerampilan diperkenankan bekerja ke Negara lain sesama anggota

---

<sup>9</sup> Lus Ambarwati. Jurnal: *Indonesia Overview of AEC 2015: What Does The AEC Mean for Foreign Investors* pdf2015  
<http://www.ina.or.id/images/stories/magazine/2016-Jan/Asean-Economic-Community.pdf> diakses 1 September 2016

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Pasha L Hsieh Journal: Examining The Liberalization of ASEAN ‘s Legal Services Market: Challenge and Reforms

ASEAN dan Negara tujuan tidak boleh melakukan proteksionisme bagi buruh dalam negerinya. Oleh karena itu, keahlian masing-masing buruh sangat diperhatikan. Persaingan antar anggota ASEAN sangat ketat, masing-masing negara harus membekali warga negaranya dengan keahlian dan keterampilan agar tidak kalah saing dengan penduduk dari negara anggota ASEAN yang lain.

Seperti yang sudah dijelaskan, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan sumber daya manusia yang tinggi. Dengan hasil penelitian tersebut, praktek liberalisasi antar anggota ASEAN dalam hal perpindahan tenaga kerja terampil berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Posisi Indonesia semakin diperhitungkan, yakni sebagai pasar tenaga kerja maupun konsumen produk olahan dari hasil tenaga kerja Indonesia yang potensial. Namun, negara anggota ASEAN masih memiliki sebuah masalah penting dalam melakukan liberalisasi melalui MEA, yaitu masalah pembagian pendapatan dinamis. Liberalisasi perdagangan di wilayah Asia Tenggara biasanya menekankan pendapatan dinamis untuk memperluas kesejahteraan dibanding efek statis (Thomas:2006). Maksudnya, dalam perdagangan bebas seperti MEA, sulit mencapai kesepakatan pembagian yang sesuai, mengingat di masing-masing negara mengalami naik turun perekonomian. Maka, untuk menyelenggarakan perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara, hal ini tidak mudah.

Hal penting untuk digaris bawahi adalah adanya kesanggupan dari Negara anggota ASEAN untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian dan pembangunan secara berkesinambungan secara regional.

Liberalisasi yang berlangsung terus menerus dianggap sebagai liberalisasi yang tidak terpadu, karena penguasa sebelumnya kurang menekankan dampak perdagangan (Thomas:2006). Kerjasama antar negara anggota ASEAN sudah lama dimulai, bahkan sebelum adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Misalnya, kerjasama antara Indonesia dengan Filipina telah menghapus tarif di bidang ekspor impor karet, perawatan kesehatan, tekstil, barang berbahan dasar kayu dan otomotif sejak 2008 dan 2009<sup>12</sup>.

Peningkatan kerjasama antar anggota ASEAN terus dikembangkan, salah satunya di bidang pariwisata. Indonesia bekerja sama dengan Negara anggota ASEAN yang lain, misalnya Malaysia, untuk mempromosikan potensi pariwisata, yang juga didukung oleh PBB melalui penandatanganan *ASEAN Tourism Agreement*<sup>13</sup>.

Menurut penulis, pariwisata disadari sebagai sebuah komoditi yang penting untuk peningkatan devisa, maka pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses ke wilayah pariwisata merupakan dukungan dari sektor perhubungan dan perdagangan. Seperti

---

<sup>12</sup> Thomas A Zimmerman. Journal: *Trade Liberalization in South East Asia*. 2006. Jerman

<sup>13</sup> UN. *ASEAN Tourism Agreement*. 2012. [http://asean.org/?static\\_post=asean-tourism-agreement](http://asean.org/?static_post=asean-tourism-agreement) diakses 25 Agustus 2016

yang dikutip dari situs Kemenpar berikut ini "Kalau sektor pariwisata tumbuh, maka industri perhubungan, kerajinan dan industri kreatif bakal tumbuh. Pariwisata itu adalah sektor yang bisa menjadi sumber devisa, dan pada suatu saat nanti terbesar di Tanah Air," kata Rizal usai pertemuan dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (19/8) lalu<sup>14</sup>. Jika semua Negara anggota ASEAN melakukan langkah serupa, bisa dibayangkan kemudahan akses yang mendukung pariwisata dan kemudian mengarah pada kemajuan investasi di sepuluh Negara anggota ASEAN. Indonesia yang diakui memiliki kekayaan alam, memiliki salah satu dari tujuh keajaiban dunia dan juga menjadi Negara yang dikenal luas sebagai tempat yang ramah penduduk lokalnya menjadi tujuan para turis mancanegara yang favorit. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan jumlah turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Hal ini tentu saja merupakan sebuah kabar baik bagi Indonesia.

Namun, kerjasama dalam bidang pariwisata masih harus terus diikuti dengan pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, pariwisata merupakan salah satu cara untuk menggenjot pertumbuhan di sektor lain. Sehingga, menurut penulis pemerintah harus terus melakukan modifikasi kebijakan dalam hal anggaran untuk mendukung kerjasama di bidang pariwisata tersebut. Jumlah penduduk

bekerja dan angka kelahiran maupun kematian merupakan masalah lain yang dihadapi berbanding terbalik dengan kebutuhan anggaran untuk pembangunan di wilayah Indonesia. Tidak berhenti sampai disitu, permasalahan bidang pembangunan masih terus berkuat pada pembebasan tanah dan wilayah pertanian yang semakin menipis karena kebutuhan pembangunan infrastruktur. Maka, pola kehidupan masyarakat tradisional yang ada di sekitar tempat pariwisata juga mengalami perubahan, yaitu transformasi menjadi masyarakat urban.

---

<sup>14</sup> Kemenpar: Pariwisata Kini Jadi Andalan Pendulang Devisa Negara  
<http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2959> diakses 25 agustus 2016

Berikut ini data resmi dari kementerian Pariwisata mengenai jumlah turis mancanegara ke Indonesia<sup>15</sup>:

**Tabel 3: Kunjungan Turis Mancanegara ke Indonesia**

**JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGERA MENURUT PINTU MASUK DAN KEBANGSAAN**  
Bulan Juli 2016

No.	KEBANGSAAN	Kode Negara	PINTU MASUK UTAMA																			Jumlah Kunjungan Wisman Melalui 19 Pintu Masuk Utama		Pertumbuhan (%)	
			Sekeloa- Hulu, Banten(U)	Ngurah Rai, Bali (U)	Kulimartani, Ampas, Medan (S)	Samudra, Kep.Riau(L+U)	Janda, Arim (U)	Sem Bintang, Sulut (U)	Endong, Nabar(D)	Mangsau, Sumbaw(U)	Adi Sumarmo, Jateng (U)	Hamudini, Sulaw (U)	BL, NTB(U)	Seringai, Kalim(U)	Sultan Sarif (U), Riau(U)	Tj.Priok, DIK Jakarta (L)	Tj.Pinang, Kep.Riau(L)	Adi Sucipto, DIY (U)	Huaini Satrianegara, Jabar(U)	Tj.Uban, Kep.Riau(L)	Tj.Daeri Marina, Kep.Riau(L)	2016	2015		
1	Singapura	SGP	11,748	8,844	817	54,064	1,659	97	7	48	1	51	977	64	183	+	4,342	901	1,505	5,945	2,433	93,086	96,759	-3.80	
2	Malaysia	MYS	16,796	12,543	8,838	15,908	4,182	66	1,894	2,776	329	657	3,609	177	1,778	+	1,236	3,426	5,434	1,155	4,547	85,451	77,627	10.08	
3	Jepang	JEP	18,953	18,221	108	1,773	564	94	4	10	+	6	86	11	7	+	27	166	122	761	4	40,817	40,236	1.69	
4	Korea Selatan	KOR	12,478	13,333	244	3,804	514	36	6	2	2	+	202	6	23	+	33	148	73	543	55	31,501	28,583	10.21	
5	Taiwan	TWN	6,281	10,916	286	521	1,014	11	49	2	8	1	22	1	28	+	55	33	32	280	16	19,556	21,486	-8.98	
6	Thailand	THA	27,030	100,595	755	3,232	1,661	6,018	24	55	3	28	756	1,108	43	+	256	377	155	4,358	60	146,504	119,376	22.72	
7	India	IND	7,845	14,394	222	4,575	538	6	10	11	2	6	63	94	72	+	251	218	115	914	259	29,555	20,368	45.11	
8	Philipina	PHI	4,592	3,126	186	3,037	293	45	12	2	7	9	26	16	21	+	120	135	67	838	97	12,629	10,674	18.32	
9	Hongkong	HKG	2,595	3,391	93	388	326	141	25	2	+	6	47	+	5	+	19	36	36	708	1	7,819	7,369	6.11	
10	Thailand	THA	3,410	2,958	290	400	1,360	35	1	27	6	11	157	4	34	+	16	402	152	148	46	9,457	6,080	55.54	
11	Australia	AUS	5,978	108,229	437	1,164	235	110	26	331	2	29	168	76	27	1	47	146	114	1,262	17	118,389	90,961	30.15	
12	Amerika Serikat	USA	8,648	15,083	364	1,203	959	90	7	61	3	37	192	35	40	+	39	278	149	369	12	27,569	23,169	18.99	
13	Inggris	GBR	6,341	22,251	388	1,686	205	80	12	58	+	31	555	25	17	+	100	354	95	632	10	32,840	27,794	18.15	
14	Belanda	NLD	12,298	15,269	1,251	461	222	68	29	59	4	68	251	10	18	+	17	370	88	89	+	30,552	27,423	11.41	
15	Jerman	DEU	4,911	15,134	447	346	229	150	10	23	+	72	383	33	12	+	39	309	58	267	5	22,429	18,599	20.59	
16	Perancis	FRA	7,876	21,968	282	521	212	65	8	94	1	102	391	16	4	+	115	742	68	289	70	32,855	25,725	27.72	
17	Rusia	RUS	778	3,734	21	124	23	9	+	+	+	+	54	2	+	+	6	30	1	87	1	4,870	5,164	-5.69	
18	Eropa lainnya *)	-	15,136	44,237	1,018	1,183	578	338	15	86	2	88	799	52	42	+	78	1,377	127	562	142	65,860			
19	Saudi Arabia	SAU	29,242	1,452	18	13	14	+	+	9	+	+	16	+	+	+	25	+	39	2	+	30,830	22,137	39.27	
20	Mali	MES	718	776	19	28	+	+	1	2	1	+	1	+	1	+	8	5	+	+	1	1,561	780	100.13	
21	Uni Emirat Arab	UAE	1,098	266	3	1	55	+	+	+	+	+	2	+	+	+	+	+	3	+	+	1,428	1,467	-2.66	
22	Bahrain	BHR	181	165	1	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	351	158	122.15	
23	Kuwait *)	KWT	740	299	+	4	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2	2	+	+	1,052			
24	Yaman *)	YMN	943	63	24	5	10	1	+	+	+	4	1	2	+	+	1	+	+	+	+	1,054			
25	Qatar *)	QAT	118	141	+	9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+	269			
26	Oman *)	OMN	2,328	183	+	17	3	+	+	+	1	+	+	+	+	+	+	+	21	+	+	2,553			
	lainnya**)	-	31,083	47,761	2,690	15,337	7,149	271	157	483	406	226	1,540	185	513	4,252	149	2,273	1,313	1,437	43	117,278	132,586		
	Jumlah 2016		240,135	485,332	18,802	209,838	22,010	7,731	2,397	4,142	777	1,432	9,698	1,877	2,868	4,253	6,970	11,732	9,776	20,626	7,819	868,216	804,521	20.35	
	Jumlah 2015		190,244	385,141	16,774	117,353	18,245	2,089	2,573	3,011	542	1,194	5,341	797	2,934	3,951	6,521	5,235	6,619	28,385	7,572				
	Pertumbuhan (%)		26.22	26.01	12.09	-6.40	20.64	270.08	-6.84	37.56	43.36	19.93	81.59	135.21	-2.25	7.64	6.89	124.11	47.70	-27.33	3.26				
	<b>KUNJUNGAN WISMAN MELALUI PINTU MASUK LAINNYA**)</b>																						64,525	73,063	-11.69
	<b>TOTAL KUNJUNGAN WISMAN MELALUI SELURUH PINTU MASUK</b>																						1,032,741	877,584	17.68

Sumber : Ditjen Imigrasi dan BPS (diolah kembali oleh Asdep Utbangkaper Kemenpar)

Catatan : Data kebangsaan tahun 2016 merupakan data sementara, karena belum termasuk data kebangsaan dari pintu masuk lainnya

Keterangan jenis pintu masuk : U (Udara), L (Laut), D (Darat)

Keterangan : \*) Data tahun 2015 masih tergabung di kebangsaan lainnya

Eropa lainnya merupakan gabungan negara-negara Eropa selain : Inggris, Belanda, Jerman, Perancis dan Rusia

\*\*) Data kebangsaan lainnya tahun 2016 tidak bisa dibandingkan dengan 2015 karena perbedaan jumlah cakupan kebangsaan

\*\*) Jumlah kunjungan wisman melalui pintu masuk lainnya tahun 2016 merupakan angka sementara

<sup>15</sup> Kemenpar. Data Kunjungan turis mancanegara ke Indonesia. [http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Lapbul%20Juni%202016\\_klasik.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Lapbul%20Juni%202016_klasik.pdf) diakses 7 September 2016



Di sisi lain, menurut penulis, dengan kemudahan akses akan berdampak pada peningkatan kunjungan yang luar biasa dari turis domestik maupun non domestik. Kegiatan perdagangan di sekitar tempat pariwisata akan menjadi salah satu cara peningkatan pendapatan daerah. Langkah ini berdampak pada masyarakat sekitar tempat wisata yang akan semakin terbiasa dengan komunikasi dalam bahasa asing, tidak terkecuali dengan sentuhan budaya asing. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap budaya dan gaya hidup masyarakat. Jika tidak mampu membendung arus perubahan, yang terjadi adalah pergeseran nilai budaya luhur yang sudah ada sejak lama di wilayah tersebut. Di Bali, misalnya, kearifan lokal berbasis agama dan adat masih sangat dijaga. Hal ini dilakukan guna menjaga masyarakat maupun tempat wisata yang ada di Bali dari gempuran perubahan yang terus diakibatkan oleh peningkatan pembangunan fisik. Terbukti, kerjasama yang dilakukan Indonesia, sebagai sebuah entitas Negara berimbas kepada peningkatan perekonomian daerah.

Pariwisata dan pembangunan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Pariwisata alam, di satu sisi menampilkan keelokan alam dan masyarakat yang masih hidup secara tradisional. Di sisi lain, pembangunan akses yang mendukung kenyamanan para wisatawan adalah hal penting dilakukan. Kenyamanan jalan hingga potensi pembangunan rumah atau wahana wisata yang menyediakan tempat tinggal berunsur alam adalah sisi lain dari pariwisata. Masih menurut penulis, dalam tahapan penyusunan kebijakan publik, pemerintah akan dihadapkan pada permasalahan kearifan lokal yang didukung oleh sebagian masyarakat, dan masalah peningkatan ekonomi dengan cara pembebasan lahan yang didukung sebagian masyarakat yang lain, yang sudah penat menghadapi sulitnya merasakan pendidikan yang layak hingga mendapatkan penghasilan yang cukup karena kesulitan akses yang selama ini dihadapi. Pembangunan yang bersebelahan dengan pariwisata tersebut, yang kemungkinan besar menjadi sebuah jalan keluar bagi masyarakat tersebut. Sulitnya mempertahankan kearifan lokal yang berseberangan dengan tantangan efek pembangunan merupakan kajian Ilmu Hubungan Internasional yang terus menarik untuk dikaji selama ini.

### 3. Unsur Penting Dalam Kerjasama ASEAN

Beberapa pemahaman penting tentang ASEAN sekilas sudah dijelaskan di atas. ASEAN yang merupakan sebuah kesatuan regional negara–negara di kawasan Asia Tenggara memiliki beberapa karakteristik dalam menjalin hubungan. Selama ini Negara anggota ASEAN mengalami diskriminasi yang cukup lama dari Negara-negara maju. Dengan sebagian besar Negara anggotanya adalah Negara berkembang, ASEAN dan juga Negara bekas jajahan Negara maju.

Namun, seiring dengan pergantian pemerintahan dan rejim di masing-masing Negara anggota ASEAN, kajian Ilmu Hubungan Internasional tentang ASEAN mengalami perkembangan. Kajian keilmuan tidak lagi berfokus pada pembahasan pemecahan konflik antar Negara anggota ASEAN dengan prinsip non intervensi, namun lebih mengarah pada kesatuan Negara anggota ASEAN dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan secara nyata di lingkup regional. Di samping itu, kajian Ilmu Hubungan Internasional terus menyoroti adanya dukungan secara ekonomi maupun pertahanan nasional dari Negara di luar ASEAN, misalnya Korea, China, dan Jepang. Negara maju seperti Amerika<sup>16</sup>, yaitu pengaruh Negara maju tersebut dalam peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Menurut penulis,

---

<sup>16</sup> Dukungan Lembaga AS untuk ASEAN. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/dukungan-lembaga-as-untuk-asean/> diakses 26 Agustus 2016

ada banyak pertimbangan yang perlu dilakukan, diantaranya:

1. Rasa persaingan antar Negara anggota ASEAN yang selama ini masih menjadi bayang-bayang Negara maju, kebergantungan Negara anggota ASEAN dengan Negara maju di luar ASEAN dan menimbulkan persaingan power diantara Negara maju maupun Negara dunia ketiga tersebut<sup>17</sup>
2. Belum adanya sebuah sistem yang tuntas dalam menyelesaikan masalah di ASEAN sebagai komunitas regional, misalnya konflik yang pecah antara beberapa Negara anggota ASEAN dengan China dalam kasus Laut China Selatan
3. Masing-masing Negara anggota ASEAN mengalami masa lalu rejim yang berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri di Negara tersebut, misalnya: konflik Indonesia dengan Malaysia (wilayah Sipadan dan Ligitan) yang terjadi sejak 1989<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Persaingan Negara ASEAN Menghadapi MEA. [http://www.rri.co.id/post/editorial/383/editorial/persaingan\\_negara\\_negara\\_asean\\_menghadapi\\_mea.html](http://www.rri.co.id/post/editorial/383/editorial/persaingan_negara_negara_asean_menghadapi_mea.html) diakses 26 Agustus 2016

<sup>18</sup>Tribunews. Ternyata ini Penyebab Sipadan Dan Ligitan lepas dari Indonesia. 2015 <http://makassar.tribunnews.com/2015/02/15/ternyata-a-ini-penyebab-sipadan-dan-ligitan-lepas-dari-indonesia> diakses 26 Agustus 2016

Dalam tulisan lain, dijelaskan bahwa ASEAN merupakan sebuah komunitas dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar (Vinayak, et al:2014). Seperti diketahui, kerjasama ASEAN sudah lama digagas dan pada akhir tahun 2015 resmi diumumkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)<sup>19</sup>. Langkah ini merupakan wujud nyata Negara anggota ASEAN yang setuju untuk bergabung dalam komunitas regional untuk memajukan perekonomian dan pembangunan di wilayah Asia Tenggara. Berikut ini empat pilar MEA<sup>20</sup> :

1. Pasar tunggal dan basis Produksi
2. Kawasan berdaya saing ekonomi tinggi
3. Pembangunan ekonomi yang merata
4. Integrasi dengan ekonomi global

Kerjasama dan persaingan adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari inetgrasi pasar bebas ASEAN atau yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kerjasama yang dilakukan oleh seluruh Negara anggota ASEAN adalah sebuah kemajuan besar dalam lingkup regional Asia Tenggara. Namun, kerjasama ini menimbulkan permasalahan baru bagi Negara anggota ASEAN untuk terus menyiapkan sumber daya yang dimiliki. Maksimalisasi potensi sumber daya adalah sebuah kewajiban bagi setiap Negara anggota ASEAN agar mampu bersaing satu sama lain.

---

<sup>19</sup> ASEAN Economic Community Blueprint. 2008. <http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf> diakses 26 Agustus 2016

<sup>20</sup>ASEAN Economic Community Blureprint. 2008.<http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf> diakses 26 Agustus 2016

Cakupan kerjasama yang merupakan sebuah sisi lain dari persaingan ditanggapi sebagai tantangan baru dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Tantangan ini akan mampu dijawab oleh setiap Negara anggota ASEAN dengan cara dan kebijakannya sendiri.

Misalnya, dalam bidang kebudayaan, dengan adanya pilar pasar tunggal dan basis produksi bagi Masyarakat Ekonomi ASEAN, masing-masing Negara anggota ASEAN harus terus meningkatkan daya saing warga negaranya. Kemudahan akses dari masing-masing Negara anggota ASEAN membuat gebrakan untuk meningkatkan devisa. Salah satunya adalah Indonesia, dengan kebijakan bebas visa<sup>21</sup> ke Negara anggota ASEAN lain. Hal ini berdampak positif dengan bertambahnya kunjungan turis mancanegara maupun domestik. Kunjungan dari Negara Indonesia ke Singapura dan sebaliknya adalah salah satu bukti dampak positif MEA<sup>22</sup>, dan kebijakan tersebut berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan warga di daerah maupun peningkatan pembangunan fisik.

Bisa dibayangkan jika setiap Negara di ASEAN menerapkan gebrakan untuk menarik investasi, maka yang terjadi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi secara regional. Di sisi lain, kita bisa melihat dari

---

<sup>21</sup> DEJ-Udom& Associates. Jurnal: Legal and Bussines Intelligence. Work Permits and Visas for Foreign Workers in ASEAN Countries pdf.2014

<sup>22</sup> Singapore Tourism Board. Jurnal: Indonesia, STB Market Insights <https://www.stb.gov.sg/statistics-and-market-insights/marketinsights/stb%20market%20insights%20-%20indonesia.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1> diakses 31 Agustus 2016

semakin meningkatnya keinginan belajar ke luar negeri. Dengan kemudahan akses dan peningkatan di sector pariwisata, penduduk di Indonesia juga dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Salah satunya adalah pembelajaran bahasa asing yang semakin dituntut sejak sekolah dasar. Hal ini dirasa penting dilakukan oleh pemerintah. Dengan peningkatan jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia, otomatis penggunaan bahasa asing sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penduduk yang berada di sekitar tempat wisata tersebut.

Peningkatan daya saing juga dilakukan di bidang yang lain, salah satunya adalah kemampuan bekerja. Semakin banyaknya sekolah menengah kejuruan dan pelatihan yang dilakukan, ditujukan untuk memenuhi tuntutan kinerja yang baik bagi penduduk di Indonesia. Hal ini dilakukan karena semakin besar arus masuk dari luar negeri yang menjadikan Indonesia sebagai lahan untuk mencari mata pencaharian. Dalam kasus masuknya buruh China<sup>23</sup> ke Indonesia, misalnya, masuknya para pekerja tenaga kasar di Indonesia dianggap sebagai sebuah masalah serius yang harus ditangani secara bijak. Di satu sisi, langkah ini akan menjadi masalah penting bagi tenaga kerja kasar domestic karena mereka yang berada di sekitar wilayah tersebut justru kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai buruh<sup>24</sup>. Di sisi lain, kita harus menyikapi

perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha maupun pembuat kebijakan. Kebijakan China adalah bersedia menerima perjanjian kerjasama dengan Indonesia asalkan mereka diperbolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja yang mereka bawa dari Negara asalnya. Sekali lagi, persaingan dan kerjasama adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dari MEA.

Indonesia yang masih disebut dengan Negara dunia ketiga, masih kesulitan untuk mengikuti pola persaingan yang sekarang mau tidak mau harus dihadapi dengan sesama Negara anggota ASEAN. Selain belum menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, Indonesia juga masih harus bergantung dengan modal yang dibawa dari investor asing untuk melakukan pembangunan. Secara entitas Negara, Indonesia terus melakukan peningkatan di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. MEA dianggap sebagai sebuah tantangan maupun sarana bagi Indonesia untuk memacu langkah ke depan, tentunya masih harus dengan cara bergantung dari investasi asing.

Kerjasama dengan China, Korea, maupun Jepang merupakan sebuah cara efektif untuk merangkul Negara maritim dalam memajukan investasi di bidang ekonomi, IPTEK, maupun budaya, sehingga kita tidak perlu lagi bergantung hanya pada investor Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Dengan begitu, integrasi secara global akan lebih mudah dilakukan jika seluruh Negara anggota

---

<sup>23</sup> Tempo.co  
<https://m.tempo.co/read/news/2015/08/31/093696421/ribuan-buruh-cina-masuk-indonesia-ini-penjelasan-menaker> diakses 31 Agustus 2016

<sup>24</sup> Banten Raya.com  
<http://bantenraya.com/utama/13919--buruh-china->

---

[dimanja-buruh-lokal-merana?format=pdf](http://dimanja-buruh-lokal-merana?format=pdf) diakses 31 Agustus 2016

ASEAN telah melakukan tugasnya untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian secara regional. Hasilnya, ASEAN sebagai komunitas regional sudah berintegrasi untuk mampu bersaing dengan komunitas regional lain di dunia, ataupun Negara lain. Lagi-lagi, kerjasama merupakan sisi lain dari persaingan. Persaingan secara global yang diawali dengan kerjasama, diharapkan akan membentuk sebuah komunitas yang kuat dan mampu bertahan secara terintegrasi di tengah pergolakan politik dan pergantian rejim di dunia. Seperti diketahui, kekuatan Amerika Serikat sebagai kekuatan penting yang ikut menentukan percaturan politik, ekonomi, maupun pertahanan keamanan di dunia, diharapkan tidak lagi terjadi.

Kajian Ilmu Hubungan Internasional mulai lebih menekankan pada kekuatan *non-state actor*<sup>25</sup>, salah satunya adalah komunitas regional seperti kawasan Asia Tenggara. Melalui upaya peningkatan yang dilakukan oleh kesepuluh Negara anggota ASEAN, diharapkan seluruh Negara anggota tersebut bersama-sama memajukan kawasan Asia Tenggara baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dengan begitu, arah untuk mencapai kesejahteraan global dapat dicapai dengan lebih optimal.

#### 4. Kesimpulan

Praktek liberalisasi oleh masing-masing negara anggota ASEAN melalui MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) merupakan

salah satu bentuk liberalisasi, yaitu dalam hal akses bebas bagi tenaga kerja untuk bekerja di negara anggota ASEAN yang lain. Kerjasama yang dilakukan antar anggota ASEAN juga berpengaruh terhadap berbagai aspek lain. Misalnya, dalam hal pembangunan, masing-masing Negara anggota ASEAN. Empat pilar penting yang menjadi dasar pembentukan MEA selama ini selalu diikat dengan kemandirian negara anggota ASEAN agar tidak lagi bergantung pada Negara maju atau Negara kaya. Melalui MEA seluruh Negara anggota ASEAN juga diharapkan mampu menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang mampu bersaing dengan Negara kaya atau Negara maju yang tadinya menjadi sumber investasi Negara anggota ASEAN. Dalam hal pertahanan keamanan, ASEAN kini tidak lagi berkuat pada isu penguatan pertahanan di masing-masing Negara karena adanya ancaman dari negara anggota ASEAN yang lain. Dengan adanya kerjasama yang dibentuk dalam MEA, maka isu persaingan antar Negara anggota lebih baik dirangkum dalam agenda kerjasama.

Posisi penting Indonesia yang masih dijuluki negara dunia ketiga, sekarang beralih ke negara dengan sumber tenaga kerja dan potensi pasar yang besar di saat bersamaan. Pembangunan dan peningkatan perekonomian di tingkat nasional maupun regional menyisakan masalah tersendiri bagi Indonesia. Dalam hal perhubungan, Indonesia terus melakukan kerjasama dengan negara ASEAN+3 untuk pembangunan infrastruktur, karena Indonesia masih harus terus

---

<sup>25</sup>Journal.

[http://scholar.harvard.edu/files/danielyewmaolim/files/limvree\\_wp2013\\_0.pdf](http://scholar.harvard.edu/files/danielyewmaolim/files/limvree_wp2013_0.pdf) diakses 31 Agustus 2016

menggenjot bidang pariwisata yang ketenagakerjaan yang menjadi sumber daya potensial untuk menambah devisa negara.

Kesiapan Indonesia masih terus menjadi masalah utama. Selain karena Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di ASEAN, Indonesia juga masih terikat hutang dengan negara non ASEAN yang lain. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam MEA di tingkat regional masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Masih banyak pertimbangan berdampak besar dalam hal arah kebijakan dalam maupun luar negeri Indonesia yang mempengaruhi arah kerjasama Indonesia.

Pembangunan infrastruktur, perumahan, hingga pembangunan non fisik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diharapkan mampu menyeimbangkan tuntutan pembangunan fisik, peningkatan ekonomi, maupun perbaikan sumber daya manusia. Sebagai negara yang masih dilabeli Negara dunia ketiga, Indonesia selama ini masih bisa mengikuti alur persaingan di tingkat regional. Meskipun seringkali tampak dipaksakan, Indonesia terbukti mampu menjadi Negara yang mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam yang dimiliki, tentunya dengan bantuan dari investasi asing.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Understanding ASEAN: Seven things you need to know”, McKinsey & Company <http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/understanding-asean-seven-things-you-need-to-know> diakses 23 Agustus 2016
- Ambarwati, Lusi. “Indonesia Overview of AEC 2015: What Does The AEC Mean For Foreign Investors?” <http://www.ina.or.id/images/stories/magazine/2016-Jan/Asean-Economic-Community.pdf> diakses 1 September 2016
- ASEAN Briefings. Understanding ASEAN’s Free Trade Agreements. <http://www.aseanbriefing.com/news/2014/02/13/understanding-aseans-free-trade-agreements.html> diakses 31 Agustus
- ASEAN Tourism Strategic Plan: 2016-2025 <http://www.asean.org/storage/2012/05/ATSP-2016-2025.pdf> diakses 31 Agustus 2016
- ASEAN. ASEAN Economic Blueprint. <http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf> diakses 26 Agustus 2016
- Brown, Ronald C. “Labor Implications of TPP: A Game Changer?” <http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/filemanager/pubs/pdfs/7-5Brown-rev20160510.pdf> diakses 31 Agustus 2016
- Charitonenko, Stephanie and Ismah Afwan, “Commercialization of Microfinance : (Indonesia)” Asian Development Bank. <http://www.adb.org/sites/default/files/publication/27539/micro-ino.pdf> diakses 24 Agustus 2016
- DEJ-Udom & Associates. 2014. Journal: Legal and Business Intelligence. Work Permits and Visas for Foreign Workers in ASEAN Countries pdf.
- Deloitte. Deloitte Consumer Insights Capturing Indonesia’s latent markets.

- <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/consumer-business/cp/jp-cp-middle-class-indonesia-en.pdf> diakses 24 Agustus 2016
- Indonesia Investment. “Pengganguan di Indonesia” <http://www.indonesia-investments.com/finance/macroeconomic-indicators/unemployment/item255> diakses 23 Agustus 2016
- Mas’oed Mochtar. 2003. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- McKinsey&Company. The Evolving Indonesian Consumer. <http://www.omron.id/img/pdf/id/Indonesia%20Consumer%20Report%202014.pdf> diakses 24 Agustus 2016
- Siow Yue Chia, ADBI Institute, ADBI Working Paper Series, “The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects”
- UNWTO. “The Impact of Visa Facilitation in ASEAN Member States” [https://www.wttc.org/-/media/files/reports/policy-research/impact\\_asean.pdf](https://www.wttc.org/-/media/files/reports/policy-research/impact_asean.pdf) diakses 31 Agustus 2016
- Vinayak et al. 2008. *Understanding ASEAN: Seven Things You Need To Know*. 2014 ASEAN Economic Community Blueprint.
- Zimmerman, Thomas A. 2006. *Trade Liberalization in South East Asia*. Jerman